



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023



*Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Blitar
Jl. Kusuma Bangsa No.60, Kanigoro,
Kec. Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66171
Tahun 2024*

KATA PENGANTAR

Dalam rangka implementasi Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang disampaikan kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran 2023, dan laporan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan kerja sama semua *stakeholder*, untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian laporan ini disusun sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban Kepala Daerah yang mendapat kepercayaan dari segenap masyarakat Kabupaten Blitar.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya, seiring doa, semoga segala upaya kita dalam membangun Kabupaten Blitar senantiasa memperoleh Petunjuk serta Ridho Allah SWT, Amin Ya Robbal Alamiin.

Blitar, 26 Maret 2024

BUPATI BLITAR,



RINI SYARIFAH

A Latar Belakang

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun, dan laporan capaian SPM. LPPD adalah amanah pasal 69 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2023 fokus pada 3 (tiga) hal, yaitu pemenuhan dokumen capaian kinerja, pencapaian target kinerja, dan pemenuhan akuntabilitas data pendukung kinerja.

LPPD Pemerintah Kabupaten Blitar disusun dengan melibatkan seluruh perangkat daerah 55 perangkat daerah yang mengampu berbagai informasi. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan penyusunan LPPD dengan serangkaian Sistem Operasional Prosedur (SOP) penyusunan LPPD untuk menjamin efektifitas dan kualitas data informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan data substansi LPPD melalui 7 tahapan: 1) rapat koordinasi penjelasan definisi operasional dan target indikator kinerja pemerintahan yang dibutuhkan dengan mengundang seluruh pejabat perangkat daerah; 2) perangkat daerah melakukan pengumpulan data kinerja melalui aplikasi SI-LPPD secara online (website); 3) Bagian Pemerintahan melakukan verifikasi data kinerja dan dokumen data dasar pendukungnya; 4) Bagian Pemerintahan memberikan laporan hasil verifikasi data kinerja kepada Inspektorat; 5) Inspektorat melakukan Validasi Data dengan mempertimbangkan informasi hasil verifikasi Bagian Pemerintahan; 6) Bagian Pemerintahan memberikan laporan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Inspektorat; 7) Perangkat melakukan perbaikan data dan melakukan Upload revisi data kinerja melalui SI-LPPD; dan 8) Perangkat Daerah melakukan entry data kinerja hasil perbaikan melalui lama website elppd.kemendagri.go.id.

Penjelasan Umum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati Blitar Tahun 2023 disusun dengan berpedoman teknis pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa



Timur bagian selatan yang secara geografis berada antara 111^o40'-112^o10' Bujur Timur dan 7^o58' – 8^o9'5" Lintang Selatan. Luas wilayah indikatif Kabupaten Blitar adalah 1.744,32 km² dan terbagi ke dalam 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan. Menurut penggunaan lahan, tegal/kebun dan sawah memiliki proporsi yang besar, basis perekonomian Kabupaten Blitar adalah pada sektor pertanian. Kabupaten Blitar memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 20^o-34^o C. Menurut klasifikasi *Schmidt-Ferguson*, Kabupaten Blitar termasuk tipe iklim B (basah). Curah hujan rata-rata per tahun adalah 1.800 mm. Berdasarkan peluang curah hujan tahunan, wilayah Kabupaten Blitar tergolong beriklim sedang sampai basah. Di bagian tenggara dan timur, curah hujan sedikit lebih besar.

Jumlah penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebanyak 1.253.550 jiwa yang naik sebanyak 10.355 jiwa dari tahun sebelumnya 2022 sebanyak 1.243.195 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Pongok yaitu 111,58 (ribu). Untuk tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar secara keseluruhan mencapai 788 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kanigoro yaitu sebanyak 1.453 jiwa/km². Jumlah penduduk rata-rata meningkat sebanyak 16.008 jiwa per



tahun selama 5 tahun terakhir atau pertumbuhan rata-rata sebesar 1,34% atau tingkat pertumbuhan sedang. Kecamatan Kanigoro memiliki jumlah penduduk sebanyak 80,70 (ribu) jiwa dan dengan luas wilayah seluas 45,32 km². Luas wilayah Kecamatan Kanigoro termasuk ke dalam urutan 5 luas wilayah terkecil setelah dibandingkan luas wilayah lainnya, yaitu Kecamatan Sanankulon, Selopuro, Udanawu, dan Wonodadi. Hal ini membuat angka kepadatan penduduknya memiliki angka yang tinggi. Selain itu, Kanigoro sejak 2010 resmi menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Wilayah Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

Piramida penduduk Kabupaten Blitar terbanyak berada pada kelompok umur 35 tahun hingga 39 tahun. Jumlah penduduk laki-laki pada usia kerja yaitu usia 15-60 tahun sebanyak



799.309 jiwa, dimana jumlah penduduk perempuan pada usia kerja yaitu 396.036 jiwa dan penduduk laki-laki usia kerja 403.003 jiwa. Maka, tingkat ketergantungan penduduk usia kerja sangat baik, yaitu 1,76, yang artinya setiap 1,76 orang usia kerja menanggung 1 orang usia tidak produktif. Jika dilihat, bentuk piramida di atas, cenderung mengerucut pada puncak, mulai kelompok umur 70 tahun ke atas, jika dibandingkan dengan dasar yang lebih lebar, yaitu umur 0 hingga 4 tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk-kenaikan alami (kelahiran, kematian).

Gambar 1.1
Piramida Penduduk Tahun 2023



Jumlah Perangkat Daerah adalah pelaksana urusan yang ada di Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2026. Pembentukan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar. Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar sebanyak 55 lembaga, terdiri dari perangkat daerah pelaksana urusan sebanyak 32 lembaga dan kecamatan 22 lembaga. Pemerintah Kabupaten Blitar juga memiliki UPT sebanyak 9 UPT dinas/badan sebagai pelaksana teknis. Dalam menjalankan pemerintahan, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan. Pegawai Negeri Sipil



(PNS) Kabupaten Blitar. Per 31 Desember 2023 PNS Kabupaten Blitar tercatat sejumlah 6.383 personil. Dari jumlah tersebut, PNS laki-laki sebanyak 2.464 orang (38,60%) dan PNS perempuan sebanyak 3.919 orang (61,40%), sebagaimana disajikan dalam gambar berikut. Pegawai mayoritas adalah golongan III jika sebanyak 3.760 orang (55%), sedangkan yang paling sedikit adalah PNS Golongan I dengan jumlah 12 orang (0,18%). Berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah PNS Kabupaten Blitar terbanyak berlatar pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) sejumlah 4.179 orang (65,47%) dan strata pendidikan PNS di Pemerintah Kabupaten Blitar yang tertinggi adalah S-3 yaitu sejumlah 1 orang atau 0,02% dari total PNS.

Pelaksanaan pemerintahan didukung oleh anggaran daerah. Jumlah pendapatan daerah ditargetkan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.480.710.428.126,46 dan mampu direalisasikan mencapai Rp 2.515.747.371.072,44 atau 101,41%. Pendapatan daerah tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 2,89% atau sebesar Rp.70.634.149.638,76. Kenaikan ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Sedangkan, untuk total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 adalah Rp.2.628.058.186.091 dan direalisasikan sebesar Rp 2.577.859.442.000 (98,10%). Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat kenaikan belanja daerah sebesar 4,43%. Pertumbuhan belanja operasi naik sebesar 5,19% dibandingkan tahun 2022, belanja modal naik sebesar 7,77% dan belanja transfer naik 8,56% dibandingkan tahun 2022. Pelaksanaan APBD tahun 2023, secara umum menunjukkan kinerja yang semakin baik ditunjukkan dengan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang semakin kecil dari Rp.288.013.504.778,93 atau menjadi Rp.196.052.703.178,46 turun sebesar 15,32 persen dibanding tahun 2022.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi daerah, dipertimbangkan isu-isu strategis daerah dan kemudian dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blitar lima tahunan disusun RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 periode ke 4. Visi Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 yang ditetapkan yakni: **“Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur*)”**. Visi



pembangunan daerah tersebut kemudian diturunkan menjadi Misi pembangunan daerah yang berjumlah 5 misi, yaitu:

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.”

MISI 2 “Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.”

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.”

MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Misi tersebut kemudian diturunkan menjadi Tujuan dan Sasaran Strategis daerah yang akan menjadi dasar kinerja tahunan pemerintah daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan disusun dengan tujuan untuk sasaran strategis tahunan yang telah ditetapkan dan menjadi janji daerah kepada masyarakat. Maka, usulan program, kegiatan dan sub kegiatan sangat penting untuk menjaga efektifitas dan ketepatan pencapaian sasaran strategis. Bagi perangkat daerah, sangat penting untuk memastikan bahwa usulan program dan kegiatan benar-benar memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran. Perangkat daerah harus mampu memberikan rasionalitas luaran dan hasil dari setiap program dan kegiatan bagi pencapaian kinerja sasaran strategis daerah. Perangkat daerah sebagai penerima wewenang dari Kepala Daerah harus memastikan bahwa seluruh usulan dana program dan kegiatan akan mampu mendukung pencapaian kinerja visi dan misi kepala daerah yang sudah dijanjikan kepada masyarakat. Matriks Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Blitar tertuang di dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel Logical Framework Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)											
NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET					KOND. AKHIR
						2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman Dan Taqwa Dengan Kearifan Lokal Budaya	MENINGKATKAN TARAF KESEJAHTERAAN DAN HARMONISASI SOSIAL KEHIDUPAN MASYARAKAT	Prosentase Penduduk Miskin	Persen	9,33	9,30	9,35	9,02	8,94	8,90	8,88
		Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS	Persen	11,76%	11,7	11,62	11,51	11,31	11,11	10,76%
		Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotongroyong Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	n/a	80 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Sangat Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)
2	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat	MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,70	92,76	92,83	92,90	92,97	93,03	93,10



	Blitar Yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar	BERPERSPEKTIF GENDER		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,58	71,15	71,48	72,06	72,52	72,97	73,42
		Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,46	12,54	12,65	12,77	12,90	13,05	13,19	
			Rata -Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,39	7,45	7,51	7,58	7,64	7,71	7,78	
			Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,52	73,62	73,72	73,89	74,07	74,27	74,54	
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	n/a	54,44	55,23	56,02	56,80	57,59	58,37	
3	Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,66	62,56	64,46	65,96	67,46	68,96	70
		Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,94	81,84	83,44	85,24	87,14	88,24	89,24	
		Meningkatnya efisiensi dan	Nilai SAKIP	Indeks	B	B	B	BB	BB	A	A	
			Indeks SPBE	Indeks	2,9	3	3,15	3,3	3,4	3,45	3,5	



		efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	59,54	61,54	64,19	67,79	71,39	74,69	78
			Persentase Desa Mandiri	%	4,09%	4,55%	5,91%	7,27%	8,18%	9,09%	10%
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	3.922	3.978	4.035	4.092	4.149	4.206	4.263
					Sangat Inovatif						
4	Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Yang Adil Dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Gini Rasio	Ratio	0.330	0,328	0,329	0,340	0,333	0,332	0,331
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	n/a	70 (Baik)	72 (Baik)	74 (Baik)	76 (Baik)	78 (Baik)	80 (Baik)
			Pertumbuhan Ekonomi	%	-2.29	2,17	5,46	7,58	5,32	5,49	5,20
		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Efektifitas Investasi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat	3,82	3,72	3,52	3,4	3,25	3,17	2,99
			Pengeluaran Perkapita (000)	Rupiah	10,654	11,152	11,480	13,794	12,812	12,466	12,155
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur	Indeks	66,07	66,88	67,83	70,80	72,77	74,53	76,66
			Indeks Resiko Bencana	Indeks	160,26	157	154	151	148	145	142
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks							



		Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



B Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah

Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja makro merupakan Capaian Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Capaian Kinerja Makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 1.
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Blitar Tahun 2023

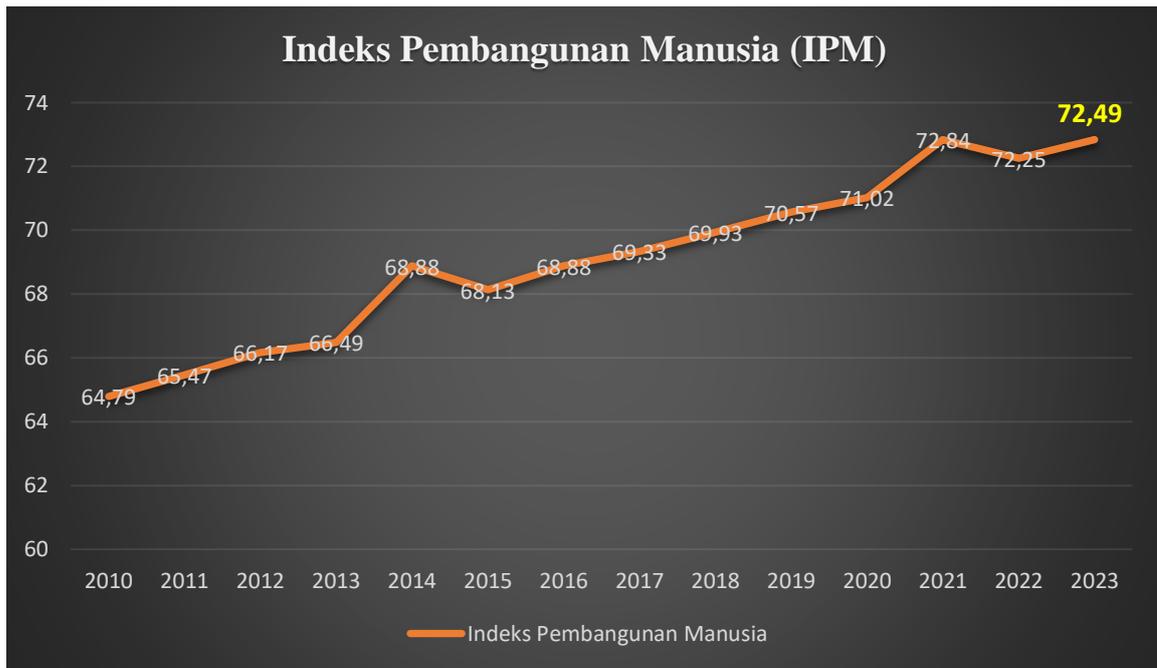
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	72,25	72,84	0,59
2	Angka Kemiskinan (%)	8,71	8,69	-0,02
3	Angka Pengangguran Terbuka (%)	5,45	4,91	-0,54
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	4,45	-0,75
5	Pendapatan Per kapita (Rp.)	33.361.748	35.811.655	2.449.907
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,335	0,36	0,025

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka, BPS 2023 (*diolah*)

Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Kabupaten Blitar terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun dari 4 indikator yaitu Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita Penduduk. Angka IPM Kabupaten Blitar menunjukkan angka yang terus meningkat secara progresif rata-rata 0,59 poin tahun 2017 - 2023. Angka IPM tahun 2017 angka IPM sebesar 69,33 poin yang terus me ningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar 72,84. Capaian angka IPM tahun 2023 ini masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur 73,38 poin dan IPM Nasional 73,39 poin. Angka IPM Kabupaten Blitar termasuk kategori menengah di Indonesia dan menempati peringkat ke 22 dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Nilai IPM pada rentang antara 70-80, termasuk dalam kategori IPM Tinggi.



Gambar 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten 2010-2023



Tabel 2
Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,58	71,05	71,86	72,84
<i>Umur Harapan Hidup (tahun)</i>	73.52	73.61	73.98	75,12
<i>Harapan Lama Sekolah (tahun)</i>	12.46	12.63	12.64	12,65
<i>Rata-rata Lama Sekolah (tahun)</i>	7.39	7.50	7.82	7,83
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	10.654	10.757	11.001	11.499

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2023 (diolah).

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka UHH Kabupaten Blitar terus meningkat selama 5 tahun terakhir secara rata-rata 0,155 tahun, di mana tahun 2017 sebesar 72,99 tahun menjadi sebesar 73,61 pada akhir tahun 2021. Capaian ini melebihi usia harapan hidup rata-rata Provinsi Jawa Timur. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan pola hidup sehat dan daya dukung lingkungan fisik di Kabupaten Blitar sangat besar bagi ekosistem yang sehat. Peningkatan UHH ini sebagai dampak makin membaiknya pelayanan kesehatan masyarakat terutama untuk pelayanan SPM yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan di tingkat strata 1 juga terus ditingkatkan, rasio posyandu per satuan balita membaik menjadi 1:46 balita, Rasio dokter per satuan penduduk membaik



menjadi 1:5.228, dan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin meningkat menjadi 28,88%. Cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin di Tahun 2022 terealisasi sebesar 11.56% atau 1.256. Perbaikan pelayanan kesehatan memberikan kontribusi terhadap peningkatan UHH setiap tahun rata-rata 0,21 tahun. Angka UHH tahun 2022 adalah 73,98 tahun atau naik sebesar 0,37 tahun dibandingkan dengan UHH Tahun 2021. Angka UHH ini dalam 5 tahun terakhir juga selalu di atas UHH Provinsi Jawa Timur. Capaian angka UHH dibandingkan daerah sekitarnya, Kabupaten Blitar sudah cukup tinggi hanya tertinggal sedikit dengan Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan sudah sangat baik dan dukungan lingkungan fisis dan sosial masyarakat di Kabupaten Blitar sangat kondusif dan mendukung.

Tabel 3
Perbandingan Kinerja IPM Kabupaten Blitar dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023

Kabupaten Blitar dan Sekitarnya	Tahun 2023				
	IPM (poin)	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran Perkapita
Kabupaten Blitar (tahun)	72,84	74,34 th	12,65 th	7,83 th	11.499.000
Kota Blitar	80,78	74,66 th	14,57 th	10,78 th	14.548.000
Kabupaten Tulungagung	74,65	74,91 th	13,34 th	8,66 th	11.565.000
Kabupaten Kediri	74,68	73,27 th	13,62 th	8,24 th	11.952.000
Kabupaten Malang	73	73,26 th	13,48 th	7,75 th	10.791.000
Kabupaten Lumajang	69,37	70,96 th	12,16 th	7,14 th	9.720.000

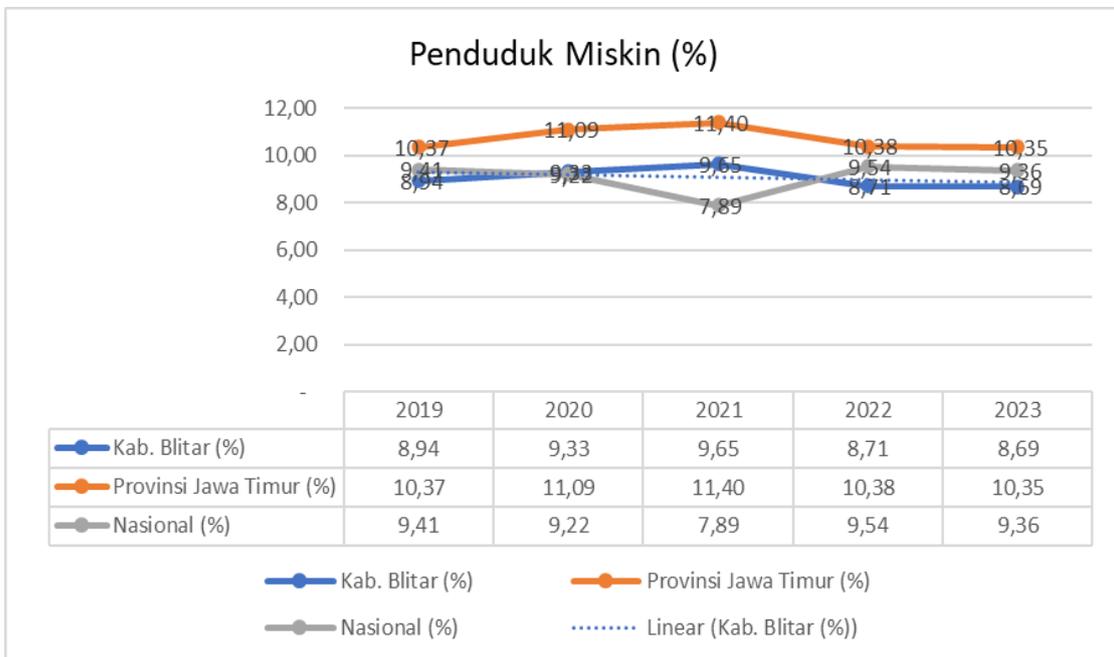
Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka, BPS, Tahun 2023.

Angka Pendapatan perkapita penduduk tahun 2023 sebesar Rp.35.811.655/ jiwa yang mana angka ini Rp.2.449.907/jiwa/tahun atau sebesar 7,34% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Angka pendapatan perkapita penduduk tahun 2022 sebesar Rp.33.361.748/jiwa. Kenaikan pendapatan perkapita ini mendorong kenaikan pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar mengalami kenaikan Rp.498.000 ditahun 2023 dari Rp 11.001.000 tahun 2022 menjadi Rp.11.499.000 pada tahun 2023.

Kinerja penanganan kemiskinan selama tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar sebanyak 101.940 jiwa per 31 Desember 2023. Angka kemiskinan tahun 2023 turun sebesar 0,02% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 8,71%. Berbagai program bantuan bagi warga miskin ini berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin Kabupaten Blitar turun moderat selama 5 tahun yaitu rata-rata sebanyak 354 jiwa/tahun. Penurunan sangat signifikan terjadi tahun 2021-2022 yaitu sebesar 10.680 jiwa dan dari



112.620 jiwa tahun 2021 menjadi 101.940 jiwa di tahun 2022. Angka ini diharapkan terus menurun sampai tahun 2023 sebesar 0,02%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Blitar tren nya terus mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata -0,48%. Penurunan angka ini lebih signifikan dari angka penurunan Nasional yaitu sebesar -0,18 dan sedikit lebih rendah di atas Jawa yaitu -0,53. Tahun 2023 angka persentase penduduk miskin sebanyak 8,69% yang mana turun sebesar 0,02% jika dibandingkan dengan tahun 2022. capaian kinerja ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan Kabupaten Blitar sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan. Penurunan jumlah orang miskin yang sangat massif dan signifikan ini, karena realisasi



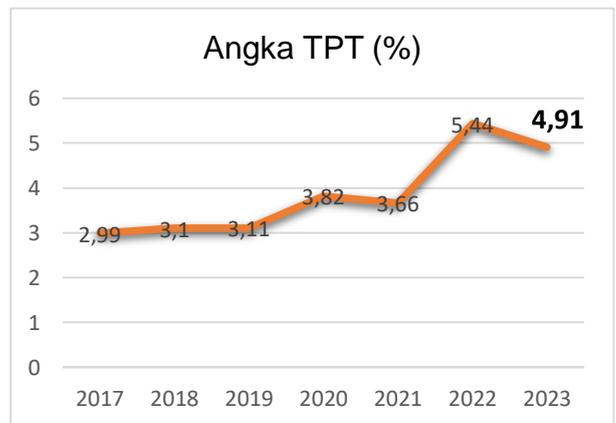
beberapa program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan warga. Kabupaten Blitar masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur 10,35% dan Nasional sebesar 9,36%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blitar sangat berhasil. Sektor basis ekonomi Kabupaten Blitar yang bertumpu pada sektor primer, yaitu masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat kini.



Kondisi kemiskinan juga dapat dilihat dari indikator kedalaman dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Blitar tahun 2023 adalah 1,2 poin. Angka ini mengalami penurunan 0,12 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 1,33 poin. Sedangkan, indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan sebesar 0,6 poin tahun 2023. Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2023 sebesar 0,24 poin dan tahun 2022 sebesar 0,3 poin. Penurunan kedua indeks ini menunjukkan adanya kesejahteraan yang makin membaik, karena rata-rata jarak Tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk dan perbedaan rata-rata Tingkat pengeluaran perkapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Blitar, makin dekat.

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Prosentase Warga Miskin (%)	8,94	9,33	9,65	8,71	8,69
Jumlah Warga Miskin (jiwa)	359,398	383,754	563,512	476,985	101.940

Kabupaten Blitar mengalami penurunan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2023 sebesar 0,53% sehingga menjadi 4,91%. Angka TPT tahun 2022 sebesar 5,44%. Selama 6 tahun terakhir ini, baru tahun 2023 ini angka TPT Kabupaten Blitar sedikit di atas angka TPT rata-rata Provinsi Jawa Timur yaitu 4,88%.



Angka TPT Kabupaten Blitar sejak tahun 2015-2022 selalu berada di bawah Jawa Timur dan Nasional.

Angka TPT Tahun 2023 menunjukkan angka penurunan secara moderat yaitu sebesar 0,53%, dari 5,44% tahun 2022 sehingga menjadi 4,91% di tahun 2023. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama 6 tahun terakhir menunjukkan angka fluktuatif naik secara moderat, yaitu 0,49%, pertahun di mana tahun 2017 sebesar 2,99% dan terus naik menjadi 5,44% tahun 2022. Tren naik ini terjadi tahun 2019 di masa awal (5 tahun terakhir) pandemi covid yaitu sebesar 3,10% dan terus naik menjadi 3,82% di tahun 2020. Tahun 2021 seiring dengan kebijakan pemulihan ekonomi, angka TPT menurun moderat sebesar 0,16% atau menjadi 3,66%. Hal ini sebagai dampak kebijakan Pemerintah Daerah yang massif dan fokus pada pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19.

Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar mengalami penurunan -0,75% dari 52% tahun 2022 menjadi 4,45% di tahun 2023. Namun demikian, angka PDRB ADHB tahun 2023 tetap mengalami kenaikan, dimana PDRB ADHB tahun 2023 sebesar Rp. 44.891,7 milyar mengalami kenaikan sebesar Rp.3,512 milyar dari sebesar Rp. 41.379,31 milyar di tahun 2022. Angka PDRB ADHB ini mengalami kenaikan rata-rata tiap tahun sebesar 2.219,56 milyar atau naik rata-rata 4,54% per tahun. Sedangkan, untuk angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga mengalami kenaikan meski tidak sebesar PDRB ADHB. Angka PDRB ADHK tahun 2023 adalah Rp.28.239,9 milyar yang mengalami kenaikan sebesar Rp.1.202,57 milyar atau naik sebesar 3,43% jika dibandingkan dengan angka PDRB tahun 2022 yaitu Rp.27037,33 milyar. Angka PDRB ADHK mengalami kenaikan rata-rata per tahun lebih rendah dari ADHB yaitu Rp.855,40 milyar atau rata-rata naik 3,34% per tahun dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

Tabel 4
Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,29%	3,02%	5,20%	4,45%
2.	PDRB ADHB (Rp. Juta,-)	36.023.960	37.819.730	41.379.310	44.891.700
3.	PDRB ADHK 2010 (Rp. Juta,-)	24.945.460	25.700.020	27.037.331	28.239.900
4.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.223.745	1.231.013	1.240.322	1.253.550
5.	PDRB Perkapita ADHB (/th/jiwa)	29.437.473	30.722.446	33.361.748	35.811.655
6.	PDRB Perkapita ADHK (/th/jiwa)	20.384.525	20.877.131	21.798.639	22.527.941

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka, BPS, Tahun 2023.



Rasio gini menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Blitar. Rasio Gini yang makin tinggi menunjukkan kesenjangan pendapatan antar penduduk yang makin tinggi, atau pemerataan pendapatan masyarakat yang rendah. Maka, makin rendah Gini Rasio, makin tinggi tingkat kemakmuran masyarakat. Gini Rasio Kabupaten Blitar Tahun 2023 menunjukkan sedikit kenaikan, yaitu 0,25 poin, sehingga Gini Rasio tahun 2023 sebesar 0.360 poin. Angka ini naik sangat rendah jika dibandingkan dengan angka tahun 2022. Meski demikian, angka gini rasio Kabupaten Blitar tahun 2023 masih jauh di bawah angka Gini Rasio Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,387 poin dan angka nasional 0,388 poin. Indikator ini juga didukung oleh capaian indikator pengeluaran rata-rata penduduk yang naik sebesar Rp.498 ribu/jiwa/tahun pada tahun 2023, dari sebesar Rp.11.000 ribu/jiwa/tahun tahun 2022 menjadi Rp.11.499 ribu/jiwa/tahun di tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Blitar relatif lebih merata atau dengan kata lain kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar lebih baik dibandingkan rata-rata kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 5
Angka Pengeluaran Perkapita dan Gini Rasio (Ketimpangan Pendapatan)
Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Angka TPT Kab Blitar (3,38)	3,05	3,82	3,66	5,45	4,91
Pengeluaran Perkapita (Rp. Ribu)	10.861	10.654	10.757	11.001	11.499
Gini Rasio Kab. Blitar	0,333	0,348	0,353	0,335	0,360
Gini Rasio Prov. Jatim	0,370	0,366	0,374	0,371	0,387
Gini Rasio Nasional	0,380	0,385	0,384	0,381	0,388

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka, BPS, Tahun 2023.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 bahwa urusan pemerintahan konkuren Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023 telah melaksanakan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mencakup 24 (dua puluh empat) urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terdiri dari 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 8 urusan pilihan. Pemenuhan data capaian kinerja luaran dan kinerja hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut:



Tabel 6
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Blitar Tahun 2023

Perangkat Daerah	Kinerja Luaran		Kinerja Hasil	
	Jumlah Indikator	% Capaian	% Capaian	Kategori
A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
1. Urusan Pendidikan	34	100%	75,11%	Sedang
2. Urusan Kesehatan	26	100%	92,61%	Sangat Tinggi
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71	71,83%	55,28%	Sedang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	33	66,67%	42,28%	Rendah
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24	75%	100%	Sangat Tinggi
6. Urusan Sosial	27	100%	100%	Sangat Tinggi
B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
1. Urusan Ketenagakerjaan	45	97,78%	100%	Sangat Tinggi
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	93,33%	100%	Sangat Tinggi
3. Urusan Pangan	8	100%	100%	Sangat Tinggi
4. Urusan Pertanahan	0	0%	61,67%	Sedang
5. Urusan Lingkungan Hidup	8	75%	57,21%	Rendah
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	100%	75,31%	Sedang
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	100%	89,47%	Tinggi
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	100%	61,30%	Rendah
9. Urusan Perhubungan	4	75%	57,80%	Rendah
10. Urusan Komunikasi dan Informatika	20	100%	89,22%	Tinggi
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20	90%	25,10%	Sangat Rendah
12. Urusan Penanaman Modal	12	91,67%	68,82%	Sangat Tinggi
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	6	100%	40,03%	Sangat Rendah
14. Urusan Statistik	7	100%	100%	Sangat Tinggi
15. Urusan Persandian	4	100%	100%	Sangat Tinggi
16. Urusan Kebudayaan	20	85%	100%	Sangat Tinggi



17. Urusan Perpustakaan	8	75%	38,60%	Sangat Rendah
18. Urusan Kearsipan	11	100%	71,04%	Sedang
C. Urusan Pemerintahan Pilihan				
1. Urusan kelautan dan Perikanan	5	100%	100%	Sangat Tinggi
2. Urusan Pariwisata	10	81,20%	100%	Tinggi
3. Urusan Pertanian	6	100%	307,2%	Sangat Tinggi
4. Urusan Kehutanan	4	50%	0%	Sangat Rendah
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Alam	1	0%	0%	Sangat Rendah
6. Urusan Perdagangan	11	45,45%	79,07%	Rendah
7. Urusan Perindustrian	5	80%	29,85%	Sangat Rendah
8. Urusan Transmigrasi	3	66,67%	0%	Sangat Rendah
D. Penunjang Urusan Pemerintahan Umum				
1. Urusan Perencanaan dan Manajemen Keuangan			100%	Sangat Tinggi
2. Urusan Pengadaan			75%	Tinggi
3. Urusan Kepegawaian				
E. Manajemen Keuangan				
1. Urusan Manajemen Keuangan			100%	Sangat Tinggi
F. Transparansi dan Partisipasi Publik				
1. Transparansi dan Partisipasi Politik			50%	Sedang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban realisasi kinerja Pemerintah Daerah atas Perencanaan Kinerja yang sudah disusun Perjanjian Kinerja.

Tabel 7
Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Target 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022		Target 2023
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1 Persentase PPKS (%)	10,92	11,31	10,92
2	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-Nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial dan	2 Indeks Kesalehan Sosial (indeks)	82 (Baik)	84,09	84,50



	Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat					
3	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	3	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	12,65	12,64	12,77
		4	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7,51	7,82	8,04
		5	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,72	73,94	74,03
4	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	6	Indeks Pembangunan Pemuda (indeks)	55,23	54,17	56,02
5	Meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik hingga ke Desa.	7	Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks)	83,44	84,59	85,24
6	Meningkatnya Efisiensi dan Eefektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	8	Nilai SAKIP (indeks)	B	B	BB
		9	Indeks SPBE (indeks)	3,1	2,61	3,0
		10	Indeks Sistem Merit (indeks)	200	223	250
		11	Persentase Desa Mandiri (%)	19,09	19,09	25,00
		12	Indeks Inovasi Daerah (indeks)	62,5	55,51	65,15
7	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	13	Tingkat Pengangguran Terbuka (tingkat)	3,52	5,44	3,4
		14	Pengeluaran Perkapita (000)	11.480	11.001	13.794
8	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	15	Indeks Infrastruktur (indeks)	70,64	75,39	74,22
		16	Indeks Risiko Bencana (indeks)	143	134,86	130
		17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)	65,45	66,80	66,80
9	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	18	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,01	0,85	2,97
		19	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	5,9	6,68	6,70
		20	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	5,5	10,75	10,80

	21	Jumlah Kunjungan Wisata (jumlah)	1.754.223	2.597.470	2.675.819
	22	ICOR	5,8	6,60	5,73

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan besaran Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023. Perjanjian Kinerja Bupati Blitar mengalami perubahan dan yang terakhir disahkan tanggal 31 Oktober 2023.

Tabel 8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023

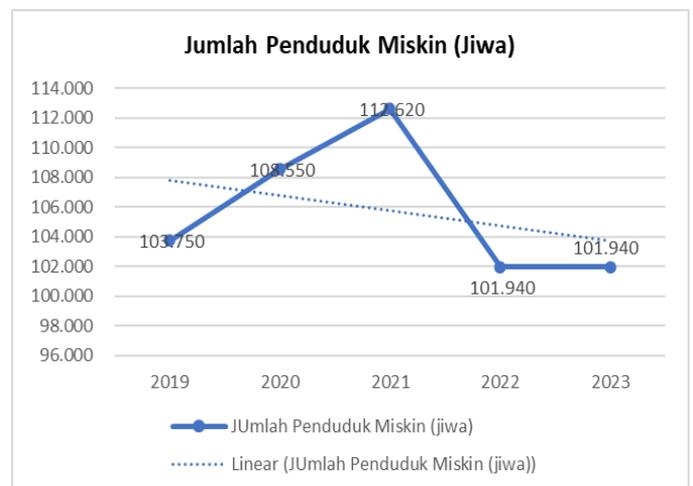
No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,02	8,09	110,31%	Sangat Tinggi
1.1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1 Persentase PPKS (%)	10,92	9,19	137,65%	Sangat Tinggi
1.2	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-Nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial dan Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat	2 Indeks Kesalehan Sosial (indeks)	84,50	84,23	99,68%	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berperspektif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,90	93,22	100,03%	Sangat Tinggi
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,06	72,84	101,08%	Sangat Tinggi
2.1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	3 Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	12,77	12,65	99,06%	Sangat Tinggi
		4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	8,04	7,83	97,39%	Sangat Tinggi
		5 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,03	75,12	101,47%	Sangat Tinggi



2.2	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	6	Indeks Pembangunan Pemuda	56,02	56,67	101,16%	Sangat Tinggi
3	Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		65,96	71,38	108,21%	Sangat Tinggi
3.1	Meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik hingga ke Desa.	7	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,24	85,61	100,43%	Sangat Tinggi
3.2	Meningkatnya Efisiensi dan Eefektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	8	Nilai SAKIP (indeks)	BB	B	97,67%	Sangat Tinggi
		9	Indeks SPBE (indeks)	3,0	3,63	121,00%	Sangat Tinggi
		10	Indeks Sistem Merit (indeks)	250	272	108,80%	Sangat Tinggi
		11	Persentase Desa Mandiri (%)	25	29,09	116,36%	Sangat Tinggi
		12	Indeks Inovasi Daerah (indeks)	65,15	61,42	94,27%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan	Gini Rasio		0,340	3,60	94,12%	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		74 (Baik)	74,56	100,76%	Sangat Tinggi
		Pertumbuhan Ekonomi		5,58	4,45	79,75%	Tinggi
4.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	13	Tingkat Pengangguran Terbuka (tingkat)	3,4	4,91	55,88%	Rendah
		14	Pengeluaran Perkapita (000)	13.794	11.499	83,36%	Tinggi
4.2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	15	Indeks Infrastruktur (indeks)	74,22	74,564	100,46%	Sangat Tinggi
		16	Indeks Risiko Bencana (indeks)	130	133,67	102,82%	Sangat Tinggi
		17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)	66,80	64,27	96,21%	Sangat Tinggi
4.3		18	Pertumbuhan PDRB Pertanian,	2,97	1,68	56,57%	Rendah

Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah		Kehutanan dan Perikanan (%)				
	19	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	6,70	6,10	91,04%	Sangat Tinggi
	20	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	10,80	5,35	49,54%	Sangat Rendah
	21	Jumlah Kunjungan Wisata (jumlah)	2.675.819	2.833.874	105,91%	Sangat Tinggi
	22	ICOR	5,73	5,30	107,50%	Sangat Tinggi

Berbagai program bantuan bagi warga miskin ini berhasil menurunkan Jumlah masyarakat miskin turun moderat selama 5 tahun yaitu sebesar 354 jiwa. Penurunan sangat signifikan terjadi tahun 2021-2022 yaitu sebesar 10.680 jiwa dan dari 112.620 jiwa tahun 2021, angka ini terus menurun sampai tahun 2023 menjadi 101.940 jiwa. Pemerintah Daerah Blitar berhasil menurunkan jumlah warga miskin secara signifikan tahun 2022. Tahun 2023 berbagai strategi kebijakan melalui bantuan bagi warga miskin terus dilakukan yaitu sebanyak 10 jenis program bantuan dengan keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 758.523 keluarga. program unggulan perlindungan dan jaminan sosial dengan memproduksi 84.679 paket makanan untuk kebutuhan dasar karantina, isoman dan pengungsi.

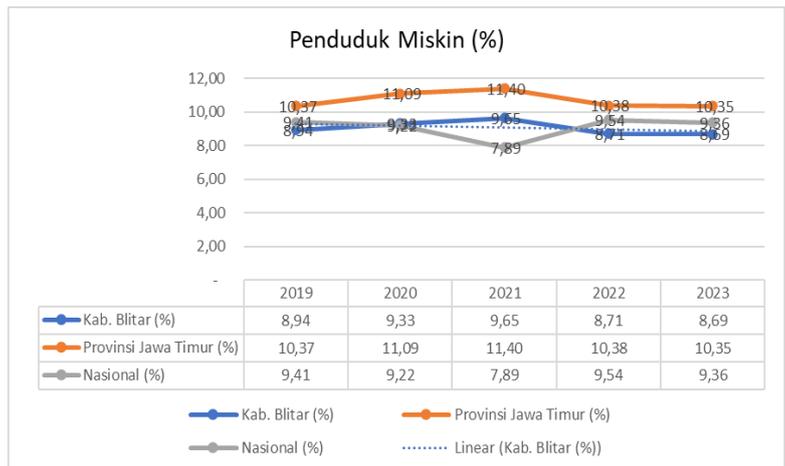


Persentase penduduk miskin Kabupaten Blitar tren nya terus mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata -0,48%. Penurunan angka ini lebih signifikan dari angka penurunan Nasional yaitu sebesar -0,18 dan sedikit lebih rendah di atas Jawa yaitu -0,53. Tahun 2023 angka persentase penduduk miskin sebanyak 8,69% yang mana turun sebesar 0,02% jika dibandingkan dengan tahun 2022. capaian kinerja ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan Kabupaten Blitar sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan. Penurunan jumlah orang miskin yang sangat massif



dan signifikan ini, karena realisasi beberapa program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan warga.

Selain Dinas Sosial sebagai *leading sector*, beberapa perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran strategis ini melalui usulan program dan kegiatan prioritas. Dinas Tenaga kerja melakukan program pelatihan kerja dan produktivitas dan program penempatan tenaga kerja. Jumlah



tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri pada tahun 2023, yakni sebesar 399 orang yang jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Blitar menghadapi kompleksitas dalam mencapai target penempatan dalam negeri. Upaya pemerintah daerah melalui program penempatan tenaga kerja lokal, seperti Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) dan Penyuluhan Bimbingan Jabatan (PBJ). WUB bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak berhasil ditempatkan pada dunia kerja formal agar dapat mengembangkan bisnis dan mendapatkan penghasilan secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan PBJ bertujuan untuk lebih mengenali kompetensi dan potensi diri dan harapannya dapat menyiapkan masyarakat khususnya lulusan sekolah menengah dalam menghadapi dunia kerja. Hal ini perlu juga di dukung penciptaan lapangan kerja padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja di Kabupaten Blitar. Persentase warga miskin Kabupaten Blitar jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota disekitarnya masih cukup rendah, yaitu 8,69% dan sedikit di atas Kabupaten Tulungagung yaitu 6,53%.

Angka IKS Kabupaten Blitar terus mengalami kenaikan secara moderat sejak tahun 2021 yaitu rata-rata 1,25 poin pertahun. Indikator tingkat kesalehan yang paling tinggi adalah faktor toleransi sebesar 92,35 disusul kemudian kerjasama sebesar 88,73 dan terakhir adalah ketertiban umum yaitu 78,39. Faktor IKS yang paling tinggi dan signifikan kenaikannya adalah variabel Solidaritas Sosial dengan kenaikan sebesar rata-rata 3,55 poin.

Keberhasilan membangun kesalehan sosial tidak lepas dari dukungan berbagai perangkat daerah antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan. Badan Kesatuan Bangsa memberikan dukungan terhadap melalui 4 program, yaitu Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dengan berbagai kegiatan antara lain Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah



KebangsaanKoordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara bersama para pelajar dan masyarakat umum. Program Ketahanan sosial dan ekonomi melalui fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat

No.	Dimensi	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori
1	Kerjasama	79,69	Tinggi	86,78	Sangat Tinggi	88,73	Sangat Tinggi
	Kontribusi	69,73	Tinggi	80,55	Sangat Tinggi	82,10	Sangat Tinggi
	Totalitas Kerja	89,64	Sangat Tinggi	93,02	Sangat Tinggi	95,36	Sangat Tinggi
2	Solidaritas Sosial	80,23	Sangat Tinggi	85,94	Sangat Tinggi	87,34	Sangat Tinggi
	Sikap Peduli (<i>Caring</i>)	81,51	Sangat Tinggi	85,86	Sangat Tinggi	88,58	Sangat Tinggi
	Sikap Memberi (<i>Giving</i>)	78,94	Tinggi	86,03	Sangat Tinggi	86,10	Sangat Tinggi
3	Toleransi	89,19	Sangat Tinggi	91,26	Sangat Tinggi	92,35	Sangat Tinggi
	Menghargai Perbedaan	92,81	Sangat Tinggi	93,94	Sangat Tinggi	95,32	Sangat Tinggi
	Menerima Multikultural	85,56	Sangat Tinggi	88,58	Sangat Tinggi	89,38	Sangat Tinggi
4	Ketertiban Umum	77,87	Tinggi	79,43	Tinggi	78,39	Tinggi
	Keterlibatan dalam Demokrasi	67,99	Tinggi	72,04	Tinggi	71,63	Tinggi
	Tata Pemerintahan yang Baik	66,03	Tinggi	73,56	Tinggi	73,31	Tinggi
	Pencegahan Kekerasan	90,59	Sangat Tinggi	90,06	Sangat Tinggi	89,59	Sangat Tinggi
	Konservasi Lingkungan	82,82	Sangat Tinggi	81,97	Sangat Tinggi	80,85	Sangat Tinggi
	Restorasi Lingkungan	81,89	Sangat Tinggi	79,55	Tinggi	76,56	Tinggi
	Indeks Kesalehan Sosial	81,74	Sangat Tinggi	84,09	Sangat Tinggi	84,23	Sangat Tinggi

Sumber: Data survei diolah (2023)

Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah bersama Forum Kerukunan Umat (FKUB) dan P4GN di Kabupaten Blitar. Program Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik tercapai 100% yang dilakukan melalui pemberian hibah kepada 9 partai politik. Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan dengan memberikan hibah kepada 12 organisasi meliputi instansi pemerintah pusat, organisasi sosial nasional dan organisasi sosial daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan dukungan terhadap melalui 4 program, yaitu Program Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan dengan berbagai kegiatan antara lain Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pemantapan ideologi Pancasila melalui Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan sosialisasi wawasan kebangsaan, dan fasilitasi Jejaring Panca Mandala (JPM). Program Ketahanan sosial dan ekonomi melalui fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah bersama Forum Kerukunan Umat (FKUB) dan P4GN di Kabupaten Blitar. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik tercapai 100% yang dilakukan melalui sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dan perempuan, pemberdayaan partai politik melalui workshop keuangan, bimbingan teknis kepada fungsionaris partai politik, pemberdayaan partai politik melalui komunikasi politik antara masyarakat dan Pemerintah, Fasilitasi Tim Pemantauan dan Penyelenggaraan Tahapan Pemulu Serentak Tahun 2024, Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Sukses Pemilu Serentak 2024, Fasilitasi dan koordinasi kelembagaan penyelenggara Pemilu dan pemberian hibah kepada 9 partai politik. Program



pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan dengan pemberdayaan ormas melalui workshop keuangan dan pelatihan administrasi bagi pengurus ormas, konsultasi dan koordinasi kelembagaan ormas, Deklarasi Damai Perguruan Pencak Silat Se-Kabupaten Blitar Bersama Forkopimda dalam mewujudkan stabilitas wilayah di Kabupaten Blitar, Forum komunikasi ormas dalam rangka cipta kondisi sukses Pemilu serentak tahun 2024 dan memberikan hibah kepada 12 organisasi meliputi instansi pemerintah pusat, organisasi sosial nasional dan organisasi sosial daerah.

Bila dilihat berdasarkan nilai Indeks Kesalehan Sosial dari tahun ke tahun, Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Blitar mengalami kenaikan tiap tahunnya. Untuk tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 84,50 dan terealisasi 84,23 sehingga target tersebut tidak tercapai. Target Indeks Kesalehan Sosial pada tahun 2023 tidak tercapai karena pada tahun 2023 merupakan tahun persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Februari. Dalam perhitungan Indeks Kesalehan Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengampu 2 (dua) dimensi yaitu Dimensi Toleransi dengan sub dimensi Menghargai Perbedaan dan Menerima Multikultural dan Dimensi Ketertiban umum dengan sub dimensi Keterlibatan dalam Demokrasi.

Indikator Usia Harapan Hidup menunjukkan hasil yang sangat tinggi dan bahkan di atas rata-rata Provinsi UHH Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan tingkat pelayanan kesehatan dan pola hidup masyarakat Kabupaten Blitar sudah sangat baik. Angka Harapan Lama sekolah (HLS) tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,01 tahun 2023 sehingga menjadi 12,64 tahun. Sedangkan, untuk angka rata-rata lama sekolah (RLS) naik 0,32 tahun menjadi 7,82 tahun yang artinya, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Blitar adalah setara dengan SMP kelas 2. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan taraf pendidikan masyarakat. Meskipun rata-rata lama sekolah hanya sampai SMP kelas 2, tetapi harapan lama sekolah masyarakat melebihi rata-rata sekolah, yaitu 12,63 tahun/setara diploma 2.

Kabupaten Blitar dan Sekitarnya	Tahun 2023				
	IPM (poin)	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran Perkapita
Kabupaten Blitar (tahun)	72,84	74,34 th	12,65 th	7,83 th	11.499.000
Kota Blitar	80,78	74,66 th	14,57 th	10,78 th	14.548.000
Kabupaten Tulungagung	74,65	74,91 th	13,34 th	8,66 th	11.565.000
Kabupaten Kediri	74,68	73,27 th	13,62 th	8,24 th	11.952.000
Kabupaten Malang	73	73,26 th	13,48 th	7,75 th	10.791.000
Kabupaten Lumajang	69,37	70,96 th	12,16 th	7,14 th	9.720.000



Peningkatan angka HLS dan RLS menjadi bukti keberhasilan pemenuhan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan. Pemerataan pendidikan bagi seluruh warga, mendorong setiap orang menuntaskan pendidikan dasar dan sekaligus memiliki harapan yang tinggi untuk dapat melanjutkan studi sampai jenjang perguruan tinggi. Perolehan rata-rata lama sekolah dan harapan untuk terus melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi menjadi komponen peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian angka IPM Kabupaten Blitar jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya masih cukup rendah, hanya mampu di atas lumajang dan sedikit di bawah Kabupaten Malang. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan sumber-sumber bacaan secara online dan literasi digital kepada masyarakat melalui teknologi informasi, harus dilakukan secara cepat dan massif. Selain itu, pendidikan kesetaraan harus mampu menjangkau seluruh warga masyarakat yang sudah terlanjur tidak mengenyam pendidikan formal. Berbagai pendidikan vokasi (kejuruan) dan kerjasama dengan balai pelatihan kerja untuk mendorong minat belajar dan harapan melanjutkan pendidikan, juga harus massif dilakukan. Dalam bidang ekonomi, insentif investasi pada sektor formal dan industri manufaktur harus diberikan, agar tumbuh kesempatan kerja sektor formal, sehingga mendorong harapan sekolah masyarakat.

Maka, untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut dilakukan beberapa strategis, antara lain: 1) melakukan Gerakan Kembali Ke Sekolah (GASAK), yaitu agar anak-anak yang putus sekolah dapat kembali ke sekolah sehingga menurunkan angka putus sekolah, 2) pembangunan SMP Negeri 03 Garum bertujuan untuk menampung siswa-siswi yang berada di lingkungan sekitar wilayah tersebut agar bisa bersekolah di SMP Negeri sehubungan dengan diterapkannya kebijakan zonasi; 3) membangun sistem PPDB Online berbasis database mulai dari tahap pendaftaran, seleksi, hingga hasil pengumuman; dan 4) penyelenggaraan Sekolah Inklusi terus berlanjut pada 2023 telah diawali tahun 2021 dengan adanya Sosialisasi, Bimtek dan dilanjutkan dengan adanya pendampingan pada sekolah yang telah mulai menyelenggarakan Sekolah Inklusi.

Dinas Perpustakaan dan Arsip memberikan dukungan dengan berbagai program antara lain pembinaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca. Jumlah lembaga yang sesuai standar nasional sebanyak 31 lembaga jauh di atas target yang ditetapkan. Untuk jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang ditingkatkan kapasitasnya, juga terealisasi 32 tenaga yang jauh di atas target. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat tahun 2023 sebesar 62,5 poin yang mana angka ini naik 2,9 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 59,60 poin. Beberapa komponennya antara lain tingkat durasi membaca

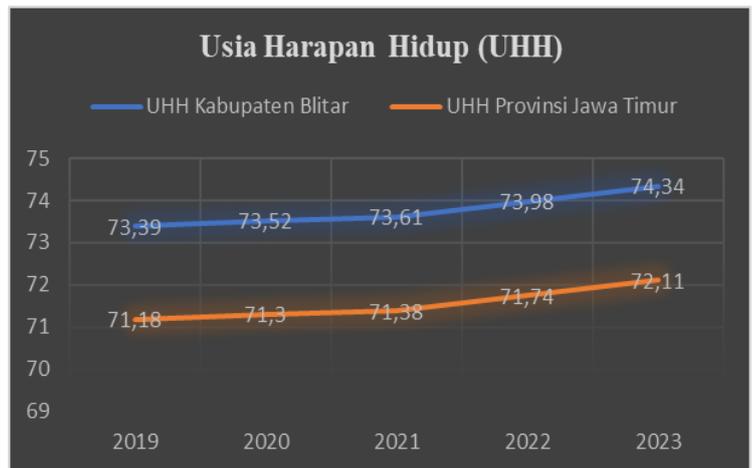


(TDM), Tingkat Frekuensi membaca (TFM) dan Tingkat Jumlah Buku yang dibaca (TJB). Tingkat kegemaran membaca Masyarakat Kabupaten Blitar juga terus meningkat secara signifikan dimana tahun 2023 sebesar 62,50 poin.

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar dilakukan melalui berbagai strategi kebijakan yaitu Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular melalui peningkatan Promosi Kesehatan tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan serta mendekatkan akses pelayanan kesehatan di Blitar terutama di wilayah Barat. Berbagai program/kegiatan yang dilakukan dalam mendukung sasaran strategis tersebut antara lain meningkatkan luasan akses sarana kesehatan masyarakat. Program peningkatan kualitas sumber daya kesehatan, program upaya kesehatan masyarakat, program kegiatan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. Dengan keterbatasan tenaga kesehatan, beberapa target kinerja dapat dicapai secara maksimal.

Faktor/komponen lain yang menopang nilai IPM adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Angka UHH Kabupaten Blitar terus meningkat selama 5 tahun terakhir secara rata-rata 0,155 tahun, di mana tahun 2017 sebesar 72,99 tahun menjadi sebesar 73,61 pada akhir tahun 2021.

Capaian ini melebihi usia harapan hidup rata-rata Provinsi Jawa Timur. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan pola hidup sehat dan daya dukung lingkungan fisik di Kabupaten Blitar sangat besar bagi ekosistem yang sehat. Peningkatan UHH ini sebagai dampak makin membaiknya pelayanan kesehatan masyarakat terutama untuk pelayanan SPM yang menjadi prioritas pemerintah daerah.



Pelayanan kesehatan di tingkat strata 1 juga terus ditingkatkan, rasio posyandu per satuan balita membaik menjadi 1:46 balita, Rasio dokter per satuan penduduk membaik menjadi 1:5.228, dan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin meningkat menjadi 28,88%. Cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin di Tahun 2022 terealisasi sebesar 11.56% atau 1.256. Perbaikan pelayanan kesehatan memberikan kontribusi terhadap peningkatan UHH setiap tahun rata-rata 0,21 tahun. Angka UHH tahun 2022 adalah 73,98 tahun atau naik sebesar 0,37 tahun dibandingkan dengan UHH Tahun 2021. Angka UHH ini dalam 5 tahun terakhir juga selalu di atas UHH Provinsi Jawa Timur.



Capaian angka UHH dibandingkan daerah sekitarnya, Kabupaten Blitar sudah cukup tinggi hanya tertinggal sedikit dengan Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan sudah sangat baik dan dukungan lingkungan fisis dan sosial masyarakat di Kabupaten Blitar sangat kondusif dan mendukung. Aspek kesehatan sudah memberikan nilai kontribusi yang besar bagi nilai IPM.

Komponen pembentuk IPM dari aspek ekonomi adalah pengeluaran perkapita warga. Pengeluaran perkapita penduduk adalah dampak dari pendapatan rata-rata perkapita penduduk. Kabupaten Blitar memiliki pengeluaran rata-rata yang sudah cukup tinggi yaitu Rp.11.499.000 per jiwa/tahun. Angka ini jauh di bawah Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Faktor utama penyebabnya adalah sektor basis ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor agraris yang memiliki nilai tambah rendah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus memberikan berbagai kebijakan kemudahan investasi untuk menarik penanaman modal sektor formal baik perdagangan, industri manufaktur, atau akomodasi dan makan minum yang jelas memiliki nilai tambah lebih tinggi. Sehingga, akan meningkatkan pendapatan rata-rata bagi penduduk dan akhirnya meningkatkan pengeluaran perkapita.

Angka Capaian UHH tahun 2023, Kabupaten Blitar masih tetap di atas Provinsi Jawa Timur. Beberapa indikator kinerja pendukung sasaran strategis antara lain:

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,45	12,46	12,63	12,64	12,65
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,29	7,39	7,50	7,82	7,83
Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,39	73,52	73,61	73,98	75,12
AKI/100.000 KH (angka)	117,33	148,43	490,58	130,48	47,58
AKB/1.000 KH (angka)	7,82	6,84	7,82	6,50	6,03
Indeks Pembangunan Gender (indeks)	92,70	92,76	92,76	93,22	-
Indeks Pembangunan Literasi Masy	n/a	n/a	11,07	82,20	14,6
Nilai Tingkat kegemaran Membaca Masy	n/a	n/a	36,60	59,60	62,5

Salah satu prioritas program pemerintah daerah, adalah penanganan stunting. Program penurunan stunting di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu pada Perpres No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Prevalensi stunting di Kab Blitar pada tahun 2023 sebesar 10,80% angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan prevalensi stunting tahun 2022 sebesar 9,23% (berdasarkan data

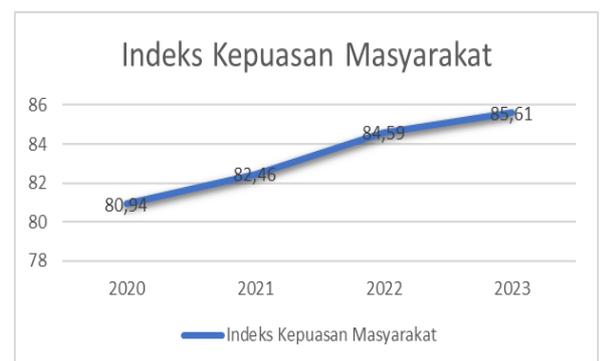


penimbangan Bulan Agustus 2022), Bila berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan prevalensi Kabupaten Blitar mencapai 14,3%.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) memberikan dukungan melalui 4 program peningkatan kualitas keluarga, program pengarusutamaan gender dan program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu indikator atas keberhasilan pembangunan gender adalah capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Capaian kinerja IPG rata-rata naik 4,92 poin, di mana tahun 2022 telah naik sangat moderat yaitu sebesar 0,46 dari 92,76 poin meningkat menjadi 93,22 poin di tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program Keluarga Berencana (KB). Salah satunya adalah penurunan resiko terjangkitnya kanker rahim dan kanker servik, dan menurunkan angka kematian maternal. Sehingga, akan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga penurunan stunting. Program ini terintegrasi dengan Dinas Sosial yang memberikan bantuan sembako untuk 84.679 orang, fasilitasi PKH 49.391 orang, fasilitasi bantuan sosial pangan 85.977 orang, dan fasilitasi bansosda 16.592 orang.



Indeks kepuasan ini naik jika dibandingkan dengan hasil tahun 2022, yaitu sebesar 84,59 atau naik sebesar 0,92 poin. Angka ini melebihi dari target kinerja tahun 2023 sebesar 85,24 poin, sehingga capaian yang diperoleh di tahun 2023 sebesar 101,43%. Adapun perangkat daerah yang dilakukan survei tahun anggaran 2023 adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Hasil detail survei kepuasan pada 5 perangkat daerah tersaji sebagai berikut di bawah ini:



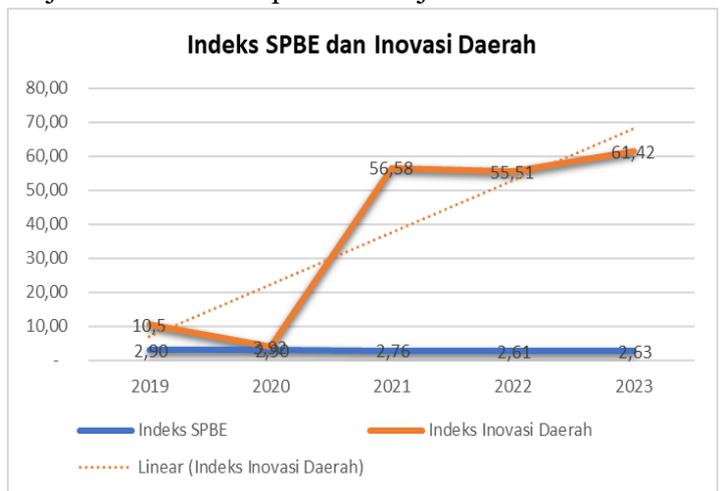
Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Pelayanan Kinerja	Kinerja Unit Pelayanan
Dinas Kesehatan	84,92	B	Baik
Badan Pendapatan Daerah	86,83	B	Baik



DPTMPSP	86,79	B	Baik
Dispendukcapil	86,22	B	Baik
Dinas Pendidikan	83,10	B	Baik
Rata-rata IKM	85,61		Baik

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan kenaikan secara moderat selama 6 tahun terakhir (2017-2023). Survei dilakukan terhadap perangkat daerah sasaran yang setiap tahun berganti-ganti. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dengan memakai 9 variabel pengukuran yang mengikuti variabel standar pelayanan. Pemerintah Kabupaten Blitar meningkatkan kualitas evaluasi kinerja pelayanan publik melalui aplikasi sistem online. bernama aplikasi survei kepuasan (SUKMA-e Jatim) melalui kerjasama replikasi Pemerintah Provinsi Jatim. Aplikasi SuKMa-e Jatim adalah salah satu inovasi Biro Organisasi Sekda Provinsi Jatim untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap layanan yang telah diberikan oleh penyelenggara layanan di Provinsi Jawa Timur. Tahun 2023, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya berhasil memperoleh hibah peningkatan fitur dan kualitas tata kelola SUKMA-e Jatim. Penambahan fitur tersebut meliputi penilaian kinerja sampai ke tingkat layanan, mekanisme kontrol validitas data, informasi kinerja berjenjang, dan kemudahan akses penilaian kinerja pelayanan publik. Pelibatkan masyarakat untuk menilai kinerja pelayanan publik ini menjadi faktor penting Peningkatan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik ke masyarakat.

Indikator capaian kinerja lainnya adalah terkait dengan Indeks SPBE dan Indeks Inovasi Daerah. Data inovasi daerah menunjukkan bahwa capaian kinerja inovasi daerah menunjukkan tren yang sangat signifikan (eksponensial) pada tahun 2021. Di mana tahun 2020 nilai IID hanya sebesar 3,92 kemudian melejit di tahun berikutnya yaitu menjadi 56,58 poin di tahun 2021. Pada tahun berikutnya mengalami tren kenaikan yang moderat sehingga rata-rata selama 5 tahun terakhir adalah 12,75 poin per



tahun. Akhir tahun 2023 nilai IID sebesar 61,42 poin. Sedangkan, untuk Indeks Nilai SPBE yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, maka angka capaiannya cenderung rendah dan flat (tetap). Bahkan, tahun 2022 sempat mengalami penurunan tipis yaitu 0,14 poin menjadi 2,76. Angka ini terus meningkat tipis tahun 2022, yaitu 0,02 poin dari 2,61 tahun 2022 dan 2,63 poin tahun 2023.

Pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2023 di Kabupaten Blitar terdapat 64 Desa Mandiri, 152 Desa Maju dan 4 Desa berkembang. Sedangkan desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sudah tidak ada lagi. Kenaikan status desa pada tahun 2023 adalah terletak pada Desa mandiri yang pada tahun 2022 hanya terdapat 42 Mandiri sedangkan pada Tahun 2023 sebanyak 64 Desa Mandiri. Kenaikan status desa maju menjadi desa mandiri tentu juga mempengaruhi pencapaian indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jika digabungkan total jumlah desa mandiri dan desa maju pada tahun 2023 adalah 216 desa atau sekitar 98%. Capaian kinerja indikator Desa Mandiri tahun 2023 sebanyak 29,09% yang mana angka ini nbaik 10% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi persentase Desa Mandiri mampu melampaui capaian nasional yaitu sebanyak 15,39%. Hasil capaian perbandingan kinerja Desa Mandiri sebagai berikut:

Kinerja Desa Mandiri	2021	2022	2023
Kabupaten Blitar (%)	4,55	19,09	29,09
Provinsi Jawa Timur (%)	9,03	19,30	36,26
Nasional (%)	4,44	8,42	15,39

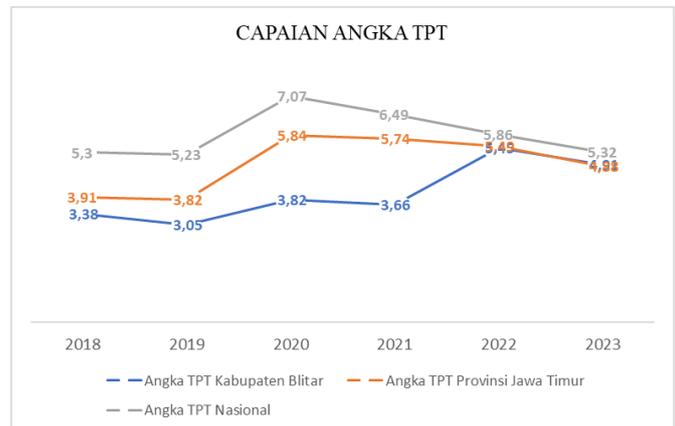
Peningkatan akuntabilitas kinerja juga dilakukan secara regulasi melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 133 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar. Regulasi ini adalah tindak lanjut dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja. Regulasi ini disusun memastikan kerangka logis pencapaian kinerja yang telah dijabarkan dengan baik dan setiap pengampu kinerja mendapatkan kinerja yang sesuai. Dukungan akuntabilitas kinerja yang lain adalah pengembangan aplikasi SIYAKIN, yaitu aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu penyalarsan kinerja antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Sistem aplikasi lain yang dikembangkan oleh Bagian Organisasi untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah yaitu Aplikasi G-Sinjab, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk penyusunan analisis jabatan (Anjab) dan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) sehingga mempercepat proses perhitungan Anjab ABK dan menyimpan data secara digital dan aplikasi SISOP yang digunakan untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Perangkat Daerah,



sehingga membantu Perangkat Daerah dalam menyusun SOP sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku sehingga akan menjadi lebih mudah, cepat dan valid.

Nilai SAKIP diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Komponen/variabel penilaian SAKIP menurut regulasi ini ada 4, yaitu aspek perencanaan, aspek pengukuran, aspek pelaporan dan aspek akuntabilitas kinerja internal. Bobot nilai perencanaan dan pengukuran kinerja sangat tinggi, yaitu 30 poin. Maka, sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan (dokumen Rencana Strategis) benar-benar menjadi dasar dalam perencanaan kinerja tahunan.

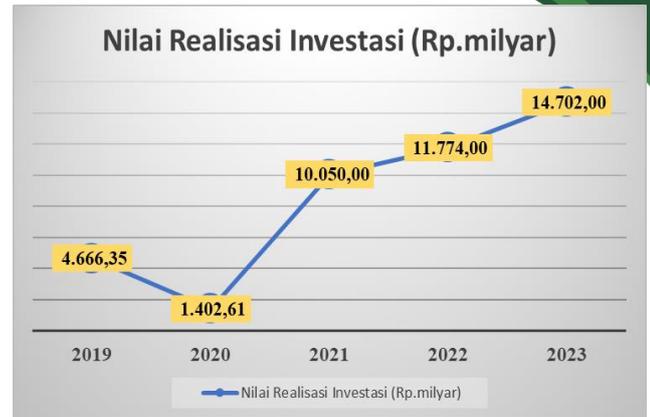
Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pengeluaran Perkapita Rp.000. Leading sektor kegiatan ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Angka capaian TPT Kabupaten Blitar sejak tahun 2018 – 2022 selalu berada di bawah angka TPT Provinsi Jawa Timur dan angka Nasional. Akan tetapi, pada tahun 2023, dalam sejarah, baru sekali ini



Capaian Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di atas Jawa Timur, meskipun sangat tipis sekali yaitu 0,03 di atas Provinsi. Angka TPT tahun 2018 yaitu 3,38% dan mengalami fluktuasi terus menjadi 5,45% tahun 2023. Hal menarik terjadi pada tahun 2021, saat itu Pemerintah Kabupaten Blitar sedang gencar melakukan pemulihan ekonomi dan berhasil menekan angka TPT turun 0,12% dari tahun sebelumnya 2020 yaitu 3,82%. Kondisi resesi ekonomi global akibat Pandemi Covid-19 masih terus berlanjut di tahun 2023. Aktivitas usaha belum sepenuhnya pulih, sedangkan angkatan kerja makin meningkat, sehingga menaikkan angka TPT. TPT yang meningkat dan angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat tajam, menunjukkan bahwa kenaikan aktivitas ekonomi masyarakat belum berdampak terhadap serapan angka pengangguran karena pertumbuhan angkatan kerja yang besar.



Pemerintah Kabupaten Blitar sangat serius dalam menggalakkan penanaman modal. Berbagai kebijakan debirokratisasi dan digitalisasi dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menarik Investasi. Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal daerah. Maka, nilai realisasi investasi terus meningkat tiap tahun sejak tahun 2021 atau setelah Covid-19. Nilai realisasi investasi dalam 3 tahun terakhir naik sangat signifikan yaitu rata-rata 40,20% per tahun. Tahun 2020 hanya sebesar Rp.1.402,61 milyar yang terus mengalami kenaikan secara signifikan yaitu rata-rata Rp.2.508,91 milyar pertahun, sehingga tahun 2023 direalisasi nilai investasi sebesar Rp.14.702 milyar.



Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan berbagai strategis kebijakan peningkatan daya saing UMKM sebagai penopang ekonomi daerah, antara lain 1) peningkatan kapasitas pengelola UMKM dalam melakukan pemasaran dan transaksi online, hal ini penting untuk meningkatkan akses pemasaran produknya dan 2) mendorong kenaikan kelas UMKM, dengan memberikan pembinaan dan pendampingan, serta fasilitasi berbagai izin usaha antara lain sertifikasi, PIRT, BPOM, dan bahkan SPPT SNI dari badan standar nasional. Kebijakan lain adalah penguatan sektor basis ekonomi Kabupaten Blitar yang bertumpu pada sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor rendahnya kenaikan angka TPT ini. Capaian kinerja ini menunjukkan pembangunan Kabupaten Blitar berbasis sektor pertanian masih mampu memiliki tingkat produksi yang baik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar yang tumbuh positif 5,20% juga telah mendorong pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK. Untuk meningkatkan layanan ketenagakerjaan, maka tanggal 28 Desember 2021 diresmikan dan diluncurkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

Terkait dengan capaian pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga tahun 2023. Kinerja pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Blitar tahun 2023, terjadi tren kenaikan moderat selama 6 tahun terakhir yaitu rata-rata naik Rp.235 ribu per orang/tahun atau 2,32% pertahun. Tingkat konsumsi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka pengeluaran perkapita penduduk tahun 2017 sebesar

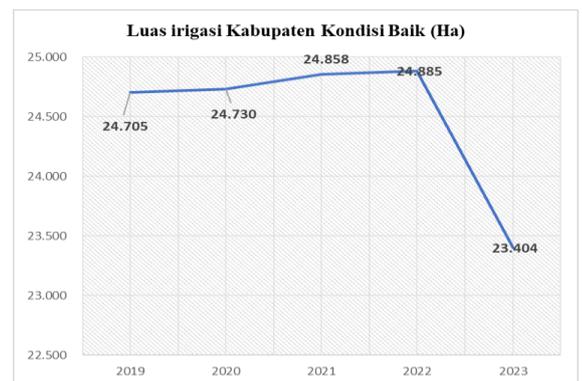


Rp.9.828.000/orang/tahun dan terus meningkat secara moderat 2,32% sampai tahun 2023 menjadi Rp.11.001.000/orang/tahun. Tahun 2020 sedikit turun akibat pandemi covid-19 dan sebagai dampak penurunan PDRB. Tahun 2021 kembali mengalami kenaikan pengeluaran perkapita penduduk yaitu Rp.10.757.000 /orang/tahun. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau diberikan pihak lain.



Angka TPT Kabupaten Blitar menunjukkan capaian yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Capaian Angka TPT sedikit di atas Kabupaten Lumajang, yaitu 3,67%. Capaian ini menunjukkan bahwa Sektor Basis ekonomi daerah yang bertumpua pada sektor agraris lebih stabil secara ekonomi dibandingkan dengan sektor industri manufaktur dan perdagangan. Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Blitar memiliki kesamaan sektor basis ekonomi daerah. Maka, Pemerintah Kabupaten Blitar harus melakukan keseimbangan dalam kebijakan, agar industri manufaktur yang masuk ke daerah, benar-benar berbasis pada hasil sektor agraris yang ditingkatkan nilai tambahnya.

Capaian kinerja setiap sub indikator menunjukkan tren kenaikan setiap tahun dan keberhasilan capaian target kinerja pada dinas pendukungnya. Perkembangan jalan Kabupaten Blitar dalam kondisi baik mengalami tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Sesuai SK Bupati Blitar no 188/492/409.06/KPTS/2019 Tahun 2019, panjang jalan daerah kabupaten adalah 1.558,30 km. Jika tahun 2017 jalan kondisi mantap sepanjang 1.025,36 km maka terus terjadi peningkatan selama 5 tahun menjadi 1.217,69 km pada tahun 2021 dan tahun 2023 terus meningkat menjadi 1.359,15 km. Selama masa pandemi Covid-19, infrastruktur tetap menjadi prioritas program kerja daerah agar tetap dapat memberikan akses ekonomi produktif masyarakat dalam rangka untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Target kinerja sub indikator Jalan Kondisi Mantap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga tercapai sebesar 78,13% atau Berhasil dari target kinerja 1.558,30 km hanya mampu terealisasi sepanjang 1.217,69 km, maka pada tahun 2023 jalan dalam kondisi



baik sepanjang 1.359,15 km atau 87,22%. Capaian kinerja cakupan (luas) daerah irigasi (DI) Kabupaten Blitar dalam kondisi baik (Ha) sampai tahun 2020 juga menunjukkan tren peningkatan luasannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2015, luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Blitar adalah 28.012 Ha. Tahun 2016 luas saluran irigasi kondisi baik adalah 24.091,18 Ha atau 86% dan terus meningkat sampai akhir tahun 2020 seluas 24.730 Ha atau 88,28%. Tahun 2021, terjadi kenaikan luasan irigasi yang berfungsi dengan baik, yaitu seluas 24.858 Ha atau 88,74%. Pada tahun 2023 jumlah luasan irigasi 24.885 ha dari 43.151 ha yang ada yang terbagi dalam 5 wilayah daerah irigasi, yaitu Garum, Srengat, Wlingi, Sutojayan dan Kesamben.

Jumlah penduduk yang memiliki akses Air Minum dan Air Bersih juga terus meningkat pada 4 tahun terakhir sebagai wujud komitmen atas hak-hak dasar layanan masyarakat. Jika tahun 2016 baru sebanyak 850.785 orang atau 74% dari jumlah penduduk, maka tahun 2019 telah menjadi 945.023 orang atau 81,42%, atau naik rata-rata



3,24% setiap tahun dan tahun 2020 sebanyak 955.012 (82%) penduduk dan akhir tahun 2021 sudah naik signifikan menjadi 1.015.955 jiwa atau 82,3% jumlah penduduk Kab. Blitar dan terakhir tahun 2023 sebanyak 1.320.322 atau sebanyak 84,17% penduduk Kabupaten Blitar. Berdasarkan target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka pada akhir 2025, seluruh penduduk (100%) harus dapat mengakses air bersih. Sedangkan, untuk indikator Persentase Rumah Tangga bersanitasi, tahun 2016 sebanyak 242.438 rumah jumlah ini terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 246.417 rumah tangga dan pada akhir tahun 2020 telah menjadi 300.137 dan tahun 2021 menjadi 301.725 rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak dan tahun 2023 sebanyak 302.375 rumah tangga atau sebesar 72,59%. Pemenuhan infrastruktur dasar penduduk menjadi salah satu upaya meningkatkan keseimbangan menjaga produktivitas ekonomi daerah dan pola hidup sehat di masa pandemi covid19 ini. Secara umum, capaian kinerja dalam pemenuhan cakupan layanan infrastruktur yang layak bagi masyarakat, dapat dicapai baik.



Kondisi jalan yang baik dan mantap juga didukung oleh sarana lalu lintas jalan raya berupa rambu-rambu lalu lintas. Prosentase pemenuhan rambu-rambu lalu lintas terus meningkat selama 5 tahun terakhir meskipun dengan prosentase kenaikan rendah karena banyaknya ruas jalan yang membutuhkan rambu-rambu. Jika pemenuhan rambu lalu lintas tahun 2016 sebesar 32,22% dari yang dibutuhkan, maka pada tahun 2020 terus meningkat naik menjadi 36,95% dari kebutuhan dan tahun 2021 menjadi 39,99% dan tahun 2022 sebanyak 42,39% luas jalan sudah terpasang rambu-rambu lalu lintas sesuai kebutuhan. Salah satu unsur keselamatan lalu lintas adalah perlengkapan keselamatan jalan yang dari grafik diatas menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, selain pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Target terpenuhinya 39,99% dari total kebutuhan perlengkapan jalan sebanyak 11.603 titik, sedangkan realisasi pengadaan rambu pada tahun 2021 sebanyak 169 unit dan tahun 2022 sebanyak 633 unit. Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang sampai pada tahun 2022 sebanyak 6.000 unit, sehingga sampai akhir tahun 2022 sebanyak 493.789 unit (mencapai 40,99%). Kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 1,46% dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini dicapai dengan dilaksanakannya perbaikan/perawatan perlengkapan keselamatan jalan untuk mempertahankan kondisi eksisting dan fungsi dari setiap perlengkapan keselamatan jalan terpasang.

Kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur makin intensif pada tahun 2022. Sebanyak 151 Kejadian Bencana, dimana pada kondisi ini mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada 2021 terjadi 181 Kejadian Bencana. Hal ini



menyebabkan terjadinya penurunan faktor komponen bahaya/ ancaman (dengan bobot 40%) yang merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, angka ini menurunkan skor IRB dari tahun lalu yaitu 154,75 (2021) menurun menjadi 141,51 (2022). Pada tahun 2023, capaian IRB semakin menurun lagi yaitu 133,67 poin. Berdasarkan uraian pengaruh komponen dalam penentuan indeks risiko bencana, maka dalam melakukan perhitungan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya/ancaman (Hazard) dan kerentanan (Vulnerability) mengikuti hasil kajian indeks risiko bencana, sedangkan untuk komponen kapasitas (Capacity) dihitung/dinilai per tahun. Semakin tinggi skor Indeks



Ketahanan Daerah (IKD) sub bidang urusan bencana pada Kabupaten Blitar, akan menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB). Maka, tahun 2022 skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mengalami kenaikan 0,02 point atau menjadi 0,58 poin di tahun 2022 dan meningkat dari tahun 2021 dengan skor 0.56. Sedangkan pada tahun 2023 Skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD) juga mengalami kenaikan 0,04 point atau menjadi 0,62. Angka Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar menunjukkan angka tren yang terus menurun rata-rata 0,97 per tahun.

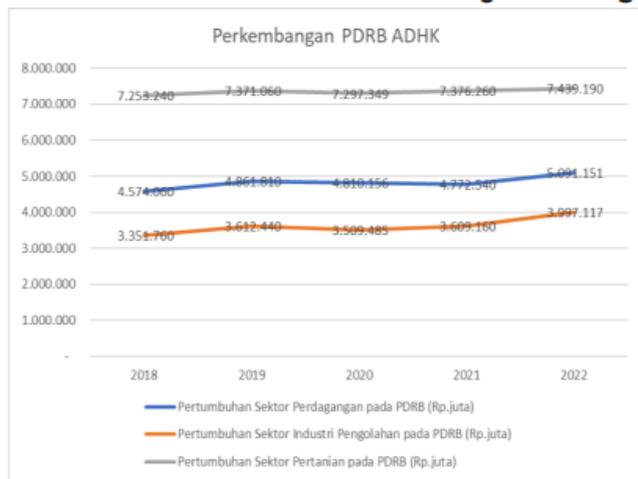
Capaian rata-rata kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 sebesar 64,27 poin yang mana angka ini menurun jika dibandingkan dengan angka IKLH tahun 2022 sebesar 66,80 poin. Meski demikian, angka IKLH masih menunjukkan tren kenaikan yang moderat selama 6 tahun terakhir, yaitu sebesar 0,07 poin setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa nilai komposit dari 3 indikator pembentuknya juga menunjukkan tren kenaikan yang moderat. Untuk indikator Indeks Kualitas Air memperoleh capaian kinerja di atasnya dari target yang telah ditentukan, yaitu dari angka target 55.2 tercapai 60,53 atau tercapai prosentase sekitar 109,66%. Sedangkan, untuk indikator Indeks Kualitas Udara dari target 86.8 juga mampu tercapai 87.63 atau sekitar 100,96% dan Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi capaian kerjanya dari target 43.55 capaian kerjanya adalah 39,08 atau hanya tercapai persentasenya sekitar 89,74%. Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan, untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Prosentase peningkatan pengelolaan kebersihan dengan target 80% dan realisasi kerjanya adalah 80,27% atau tercapai 100,34%.

Laju pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 sebesar 5,2% atau meningkat tajam sebesar 2,18 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,02%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Blitar sudah mulai normal dan membaik seperti tahun 2019. Ketiga sektor pendukung sasaran strategis juga tumbuh positif, yaitu Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB tumbuh positif sebesar 6,68% dan tercapai kinerja sebesar 113,22% dari target yang ditetapkan, Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB telah tumbuh sangat signifikan yaitu 10,75%, dan untuk Sektor Pertanian terhadap PDRB akan tumbuh 085%. Diantara 3 sektor unggulan tersebut, Sektor Industri Manufaktur menempati urutan pertama dari nilai tingkat pertumbuhan ekonominya, yaitu rata-rata tumbuh sebesar Rp.161.339 juta atau naik-rata-rata sebesar 4,63% setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu meningkat rata-rata sebesar Rp.129.273 juta atau rata-



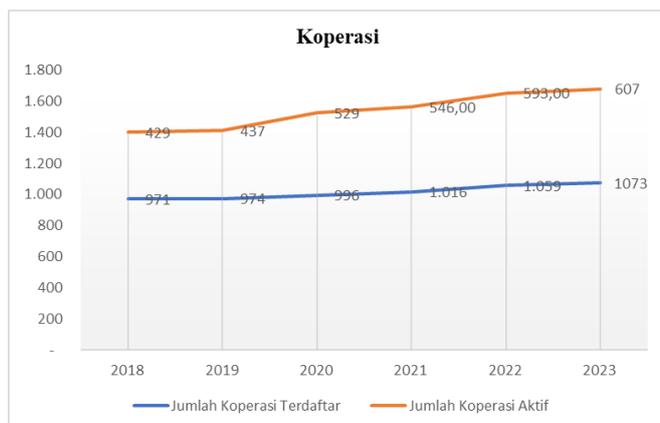
rata naik 2,78%. Dan terakhir adalah sektor pertanian yang hanya tumbuh Rp.46.487 juta atau 0,46%. Meski demikian, secara rata-rata ketiga sektor ini telah tumbuh positif dan menopang perekonomian daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi kreatif dan produktif melalui berbagai program pembentukan wirausaha muda, yaitu bekerja sama dengan USAID melaksanakan program USAID JAPRI (Jadi Pengusaha Muda) dan program ABANGWIRA (Audisi Pengembangan



Wirausaha) yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang menysasar wirausaha muda yang telah merintis usaha dengan tujuan untuk menaikkan omzet. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan kegiatan SEDEKAH ILMU. Melalui SEDEKAH ILMU diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi penambah penghasilan keluarga di masa pandemi. Sedekah Ilmu adalah Alumni UMKM Naik Kelas 2020 yang menyedekahkan ilmunya kepada peserta secara sukarela/tanpa honor. Jumlah UM Kabupaten Blitar pada tahun 2023 total jumlah UM di Kabupaten Blitar sebanyak 31.056 UM dan yang dibina baru sebanyak 305 usaha atau hanya sekitar 0,98%. Usaha Mikro dan Kecil yang terdata terdiri dari berbagai sektor usaha antara lain usaha makanan dan minuman, kerajinan, fashion, jasa, perdagangan. Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sedangkan, untuk program pengembangan koperasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya pengurus koperasi dan akses permodalan koperasi. Tahun 2023, sebanyak 30 koperasi yang mendapat fasilitasi rekom izin usaha simpan pinjam, sebanyak 20 koperasi yang fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas KSP, sebanyak 150 pengurus koperasi yang telah



mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota, dan 120 koperasi yang mengikuti bimtek penguatan kelembagaan dan manajemen.

Berbagai program dan kegiatan ini mendorong, sebanyak 22,80% menjadi koperasi yang berkualitas. Salah satu kriteria koperasi yang berkualitas adalah koperasi aktif. Di mana keaktifan koperasi ini menunjukkan eksistensi serta produktifitas



koperasi yang ditandai dengan mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam kurun waktu dua tahun terakhir atau koperasi yang tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Kemudian terjadi peningkatan volume usaha dan assetnya. Berbagai pembinaan ini mendorong keaktifan koperasi dalam melakukan ragam kegiatan ekonomi. Jumlah koperasi terus mengalami tambahan peningkatan selama 5 tahun terakhir rata-rata 22 koperasi baru setiap tahun dengan rasio koperasi aktif dan yang terdata sebesar 50,39%. Sedangkan, untuk koperasi aktif rata-rata tumbuh sebesar 41 koperasi setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi sangat positif di Kabupaten Blitar.

3.1. Dasar Hukum

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 1 Ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah serta dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat



dilakukan menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan Pelayanan Umum.

C Capaian Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp. 3.000.000.000 ,00 (tiga milyar rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.894.618.649,00 (96,49%), yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Program Perdagangan Dalam Negeri.



Gambar 4.1. Revitalisasi Pasar Sidorejo, Kecamatan Ponggok

Total sejumlah 66 kabupaten/kota menerima alokasi Dana Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan pada Tahun Anggaran 2023. Di Provinsi Jawa Timur, hanya 5 (lima) kabupaten/kota yang mendapatkan penugasan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat ini, yaitu Kabupaten Blitar (Pasar Sidorejo), Kabupaten Jember (Pasar Sempolan), Kabupaten Gresik (Pasar Sidayu), Kabupaten Sampang (Pasar Torjun), dan Kota



Malang (Pasar Madyopuro). Revitalisasi pasar rakyat ini penting untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat dalam upaya meningkatkan dan mendongkrak perekonomian masyarakat. Pasar rakyat sebagai penggerak roda ekonomi memiliki fungsi strategis sekaligus kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Aspek sosial budaya inilah yang menjadi nilai unik tersendiri bagi pasar rakyat, yang membutuhkan penanganan khusus dalam pengelolaan, pengembangan, serta pelestariannya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Tahun 2023 yaitu penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 pada bulan Maret 2023 atau pada saat tahun anggaran sedang berjalan. Berbeda dibanding tahun sebelumnya, dimana pada bulan November 2021, Kementerian Perdagangan telah menyampaikan lokus kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022. Hal ini berdampak selain pada jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang semakin pendek, juga pada proses penganggaran kegiatan pendamping pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan, dimana dana senilai 3 milyar tersebut hanya dapat dipergunakan untuk bangunan fisik saja, sedangkan untuk kebutuhan lain diantaranya meliputi sosialisasi, relokasi pedagang, *appraisal*, penyiapan lahan, instalasi listrik, harus disediakan oleh pemerintah daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan beberapa langkah untuk mengatasi masalah yang terjadi.

- 1) koordinasi intensif antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Bappedalitbang, BPKAD, BPN Kabupaten Blitar, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, agar proses penganggaran maupun pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih cepat dan akuntabel, sehingga dapat segera dilakukan proses pematangan lahan dan tahap pembangunan.
- 2) Selain itu, juga dengan meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, selaku instansi pemberi tugas pembantuan sehingga dapat meminimalisir kendala, baik yang bersifat teknis maupun administratif.
- 3) Pemilihan Barang/Jasa menggunakan e-katalog sehingga proses pengadaan barang dan jasa



NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	KE T
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(10)</i>	<i>(12)</i>
1.	Kementerian Perdagangan	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023	Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat	Pasar Patok, Sidorejo, Kec. Ponggok Kabupaten Blitar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar	3.000.000.000	2.894.618.649 (96,49%)	100%	

C Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal

Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 18, dijelaskan Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang *excellent*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Sosial; dan
6. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kebijakan SPM secara umum dimaksudkan untuk :

1. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah dengan mutu tertentu;
2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah;
3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan;



4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauh mana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik;
5. Memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya *check and balances* yang efektif; dan
6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Blitar memberikan dukungan membentuk Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), melalui Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/234/409.1.2/KPTS/2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Blitar, dengan susunan tim sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Bupati Blitar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- Anggota : a. Inspektur Kabupaten Blitar.
b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.
d. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar.
e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.
f. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar.
g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.
h. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.



- i. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.
- j. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar.
- k. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.
- l. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Capaian kinerja 6 urusan Pemerintahan Wajib layanan dasar, tersaji secara ringkas sebagai berikut:



Rekapitulasi Kinerja SPM Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					
01.00	Pendidikan Dasar Usia Dini				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	80%	80%	80%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	81,70%	17,78%	20%	20%
02.00	Pendidikan Dasar				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	80%	80%	80%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	14,97%	20%	20%	20%
03.00	Pendidikan Kesetaraan				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	80%	80%	80%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	20%	10%	20%	20%



Rekapitulasi Kinerja SPM Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					
01.00	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	19,97%	39,38%	75,05%	79,44%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	8,33%	12,38%	15,70%	19,44%
02.00	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	20,90%	41,59%	62,49%	79,95%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	12,61%	15,18%	17,80%	19,14%
03.00	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	20,22%	41,07%	61,29%	79,37%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	10,04%	13,50%	16,87%	19,88%
04.00	Pelayanan Kesehatan Balita				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	15,48%	38,75%	54,22%	79,30%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	8,41%	10,84%	13,42%	17,92%
05.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	33,28%	75,70%	78,18%	79,80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	14,66%	14,65%	14,65%	19,79%



06.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	17,54%	38,24%	52.57%	79,91%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	84,47%	19,92%	19,92%	19,87%
07.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	25,69%	47,66%	73.35%	79,37%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	15,33%	16,89%	19,30%	19,69%
08.00	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	15,41%	34,39%	47.71%	79,78%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	16,09%	18,58%	19,23%	19,77%
09.00	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	25,76%	48,70%	60.61%	79,79%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	16,76%	19,89%	19,89%	19,81%
10.00	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	32,19%	71,21%	76,16%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	17,03%	17,12%	17.12%	20%
11.00	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				



	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	31,40%	46,51%	57,85%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	15,20%	16,06%	17,21%	19,46%
12.00	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	15,04%	29,25%	41,83%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	14,60%	14,95%	18,18%	18,12%

Rekapitulasi Kinerja SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	70,44%	70,44%	70,44%	71,76%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	17,61%	17,61%	8,23%	8,97%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	71,85%	70,44%	71,51%	70,84%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	10,78%	17,70%	17,88%	17,71%



Rekapitulasi Kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	40%	50%	78,46%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	2,5%	10%	15%	20%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	0%	0%	80%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	20%	20%	20%	20%

Rekapitulasi Kinerja SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	80%	80%	80%	80%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	7,21%	10,74%	15,67%	15,71%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				



KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	80%	80%	80%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	10%	15%	15%	20%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	80%	60%	80%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	0%	17,73%	20%	20%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	80%	80%	80%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	13,23%	20%	20%	20%
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	80%	71,11%	80%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	12,33%	18,41%	19,94%	10,84%



Rekapitulasi Kinerja SPM Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	80%	80%	76,46%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	18,46%	18,46%	16,62%	20%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	80%	80%	56%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	6,67%	6,67%	10,67%	20%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	80%	80%	75,43%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	18,46%	18,46%	13,14%	20%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	80%	80%	58,67%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	18,33%	18,33%	15,11%	20%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	80%	80%	77,09%	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	20%	20%	19%	20%



Berdasarkan hasil capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Blitar Tahun 2023, sebagaimana dtersaji lengkap dalam bab II, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 9
Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja SPM
Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023

No	SPM Urusan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Perubahan	Naik (Turun)
1.	SPM Urusan Pendidikan	100%	98%	100%	2%	Naik
2.	SPM Urusan Kesehatan	82%	91%	99,13%	8,13%	Naik
3.	SPM Urusan Pekerjaan Umum	12,94%	92%	84,64%	7,36%	(Turun)
4.	SPM Urusan Perumahan Rakyat	50%	12%	100%	88%	Naik
p5.	SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	95,02%	79%	97,31%	18,13%	Naik
6.	SPM Urusan Sosial	82,72%	87%	100%	13%	Naik
Rata-rata Kenaikan		70,45%	76,50%	96,39%		

Capaian pelaksanaan SPM Tahun 2023 secara umum mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar 19,89%. Capaian SPM tertinggi dicapai oleh Urusan SPM Pendidikan dan sosial yang mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan daerah. Sebaliknya, capaian SPM terendah adalah SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Beban SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri 2 indikator yaitu Pemenuhan Air Minum dan Air Limbah membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga pencapaian dilakukan secara bertahap. Kenaikan capaian ini merupakan realisasi perwujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar yang semakin besar pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang menjadi hajat hidup masyarakat Kabupaten Blitar.

Pemerintah Daerah berupaya keras untuk meningkatkan capaian nilai SPM di masa mendatang melalui berbagai rencana aksi antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi lebih intensif kepada seluruh OPD pengampu SPM untuk lebih memprioritaskan pencapaian kinerja SPM dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun sistem basis data capaian SPM yang akan menjadi rujukan bagi seluruh perangkat daerah pengampu dalam evaluasi dan penilaian SPM.
3. Meningkatkan prioritas program dan kegiatan pada pencapaian kinerja SPM.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memberikan prioritas anggaran kegiatan pendukung SPM.



Hasil kinerja SPM Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut di atas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja tahun 2023 ini. Pemerintah Kabupaten Blitar menyusun Rencana Aksi tahun depan untuk mengoptimalkan capaian SPM lebih tinggi. Beberapa rencana aksi ini antara lain:

1. Mengkoordinasikan kebijakan integrasi indikator SPM ke dalam RPJMD dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan integrasi SPM ke dalam Dokumen Rencana Strategis perangkat daerah kepada seluruh OPD pengampu SPM, sehingga memperoleh prioritas kegiatan untuk dilaksanakan, mengingat SPM adalah urusan wajib pelayanan dasar yang merupakan hak warga negara.
2. Melakukan usulan optimalisasi kebijakan penataan kelembagaan, agar wewenang tugas dan fungsi perangkat daerah pengampu SPM dikembalikan kepada pengaturan kebijakan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga tanggung jawab perangkat daerah akan selaras dengan tanggung jawab capaian indikator SPM yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021. Saat ini realisasi indikator capaian SPM Pekerjaan Umum berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Meningkatkan sistem manajemen pelaksanaan SPM daerah yang dimulai dari mengkoordinasikan ke perangkat daerah untuk mengintegrasikan indikator dan target SPM ke dalam perencanaan strategis daerah dan perangkat daerah, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, koordinasi basis data untuk pengendalian, sampai dengan pelaporan capaian SPM tahunan pemerintah daerah.
4. Mengkoordinasikan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah pengampu SPM, untuk memberikan perhatian dan prioritas serta fokus orientasi kegiatan yang dapat meningkatkan capaian SPM.

